BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Hubungan Kerjasama Bilateral Indonesia – Australia

Secara geografis letak Indonesia sangat dekat dengan Australia. Bagi Australia, Indonesia adalah tetangga Australia yang terdekat.Menurut Lembaga Australia Indonesia (AAI), hubungan antara kedua negara ini mempunyai sejarah yang panjang. Persamaan antara hewan dan tanaman yang ada di Australia, Irian Jaya, Nusa Tenggara dan Sulawesi merupakan bukti adanya hubungan tersebut. Juga terdapat hubungan sosial dan budaya. Cerita mengenai hubungan ini sudah lama dimulai dalam sejarah manusia. Namun sulit untuk mengatakan kapan tepatnya hubungan antara Australia-Indonesia itu dimulai.

Australia merupakan salah satu dari negara-negara yang pertama *mengakui* hak Indonesia untuk merdeka. Lembaga Australia-Indonesia didirikan pada tahun 1989. Lembaga ini bertujuan untuk:

1. Ikut mengembangkan hubungan yang stabil antara kedua negara kita;
2. memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai keanekaragaman budaya di Australia, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi
3. mengembangkan pengertian masyarakat Australia mengenai keanekaragaman budaya di Indonesia dan peluang kerja sama ekonomi.

Lembaga ini mendorong adanya hubungan antara orang Australia dan Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, media,

perniagaan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan kesenian. (www.dfat.gov.au/aii/publications/bab11/index.html)

Sejak 1988, sasaran kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia tampaknya ada 4 hal,yaitu:

1. Sasaran pertama dan yang paling utama ialah menciptakan suatu stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan kedua Negara.
2. Sasaran kedua ialah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan saluran-saluran dialog terbuka dan terus terang dengan Indonesia, untuk memperkuat saling percaya dan pengertian antara kedua bangsa yang sangat berbeda system politik, hukum, sejarah, bahasa dan budayanya.
3. Sasaran ketiga ialah kerja sama dengan Indonesia di arena politik dan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu regional Asia Tenggara dan Asia Pasifik.
4. Sasaran keempat dan terakhir ialah apa yang disebut oleh Australia sebagai "*multi-dimentional approach*" atau "*broadening the relationship*" jauh dari penekanan hanya kepada masalah politik ke penekanan-penekanan baru pada kerja sama ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan.

Kedua negara memiliki kepentingan bersama untuk menciptakan suatu Asia Tenggara yang stabil dan makmur. Itulah sebabnya kedua negara bekerja sama secara aktif dalam penyelesaian menyeluruh masalah Kamboja, aktif di dalam ASEAN *Regional Forum*, bahu membahu di dalam APEC, PECC, Cairns Group, dsb.

Bagi Australia, Indonesia dipandang sebagai sesama "*midle power*" (kekuatan menengah) di Asia Tenggara yang bisa diajak untuk menggalang kekuatan dan bekerja sama dalam menjaga serta mempromosikan stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Itulah sebabnya Indonesia diajak oleh Australia untuk menandatangani *Agreement on Maintaining Security* pada 18 Desember 1995. Sebaliknya bagi Indonesia, Australia juga bisa menjadi mitra yang alamiah untuk meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia. Indonesia juga membutuhkan diversifikasi pasokan peralatan tempurnya, agar tidak tergantung pada pasokan dari AS, seperti pembelian pesawat tempur Hawke dan tank Scorpion dari Inggris. Karena Inggris adalah induk negara-negara persemakmuran dan sekutu Australia di dalam *Five Power Defence Arrangement* (FPDA), maka kerjasama keamanan Indonesia-Australia, perlu diperkuat. Dengan kata lain, kerangka kerja sama keamanan Indonesia-Australia, menjadi salah satu batu loncatan Indonesia untuk mendapat kepercayaan negara-negara anggota FPDA dan mempermudah pasokan peralatan militer dari Inggris dan anggota persemakmuran lainnya. (www.dfat.gov.au/aii/publications/bab11/index.html)

Dalam segi ekonomi, Dalam pertemuan, Perdana Menteri Howard dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali juga telah setuju untuk mempelajari kemungkinan Perjanjian Perdagangan Bebas bilateral, yang telah direkomendasikan oleh para pemuka bisnis di kedua negara

Kemudian dalam hal Keamanan Indonesia-Australia maka di sepakatlah sebuah perjanjian yang kemudian dikenal dengan nama Perjanjian Lombok yang resmi berlaku sejak 7 Februari 2008 dan menjadi landasan kuat bagi kedua negara

untuk meningkatkan hubungan bilateral itu memuat 10 butir kerja sama.Ke-sepuluh poin kerja sama dalam Perjanjian Lombok itu adalah kerja sama di bidang pertahanan, penegakan hukum, kontra terorisme, intelijen, keamanan maritim, keselamatan pembangunan dan keamanan pencegahan senjata pemusnah massal. Seterusnya kerja sama tanggap darurat, kerja sama dalam organisasi dunia menyangkut isu-isu keamanan, serta kerja sama antar masyarakat (*people-to-people*). Terhadap ke-10 poin kerja sama ini, masalah keamanan, khususnya kontra-terorisme, menjadi bagian dari kepentingan besar Australia namun tidak demikian halnya dengan kerja sama antarmasyarakat.

Dinamika hubungan RI-Australia beberapa puluh tahun lalu berlangsung terjadi , misalnya masalah Timor Timur yang menimbulkan beragam reaksi, baik di tanah air maupun di negara kanguru tersebut. Demonstrasi, ancaman dan tindakan embargo atau boikot ringan terjadi. Kedubes RI di Canberra serta konjen/konsulat lainnya di Australia telah menjadi sphere unjuk rasa dari berbagai kelompok masyarakat Australia. Ini juga termasuk penurunan/pembakaran bendera dan penolakan pelayanan kargo dan check-in bagi jasa penerbangan Garuda di sana. Namun, aksi balasan juga terjadi di Kedubes dan konsulat Australia di Indonesia. (web.pab-indonesia.com/content/view/18394/60/)

Ketegangan juga ditambah dengan keluarnya berbagai ancaman dan tindakan pemutusan hubungan dagang kedua belah pihak. Dalam konteks ini, juga berkembang opini publik di tanah air bahwa hubungan diplomatik dengan Australia sebaiknya dibekukan saja. Bahkan muncul spekulasi publik mengenai kemungkinan terjadinya perang antara RI dan Australia. Diakui bahwa

ketegangan yang ada sekarang merupakan titik terendah dalam sejarah hubungan Indonesia-Australia sejak akhir 1940-an. Eskalasi ketegangan terutama bermula karena adanya *mixed feeling* dalam penyikapan terhadap pelaksanaan jajak pendapat (*popular consultation*) dengan kemenangan mencolok (78,5%) bagi kalangan anti-integrasi. Pihak Indonesia menengarai adanya kecurangan yang dilakukan pihak Australia lewat UNAMET, sehingga keabsahan hasil jajak pendapat dipertanyakan khususnya oleh publik. Sementara reaksi dunia internasional, khususnya Australia, justru semakin mencurigai adanya rekayasa pihak Indonesia, misalnya melalui "kolusi" TNI dengan gerakan milisi, guna menganulir atau mementahkan hasil jajak pendapat tersebut.

Public attitude dari rakyat Australia yang berlebihan, apakah karena faktor perbedaan budaya dan sebagainya, juga telah memperburuk keadaan. Ini termasuk posisi media massa Australia yang kerap dinilai memojokkan Indonesia secara tidak berimbang. Pada masa pemerintahan Suharto, kritik tajam David Jenkins atas kekayaan keluarga Cendana bahkan pernah menyebabkan hambarnya hubungan bilateral kedua negara.

Juga pada tahun 1992, Miles Kupa menulis tentang situasi Indonesia yang kemudian dibocorkan dan disebarluaskan oleh media pers Australia. Beberapa kesimpulan dan saran yang dikemukakan di paper itu ialah Praktek-prektek korupsi dalam pemerintahan Presiden Suharto telah meluas, dan semakin parah, sehingga menimbulkan keresahan dan kejengkelan, tidak saja di kalangan masyarakat tetapi juga di kalangan ABRI, Karena itu dapat diperkirakan bahwa

akan terjadi kerusuhan bahkan mungkin juga usaha kup sebagai ungkapan rasa tidak puas yang semakin mendalam

Pemerintah di Canberra sebaiknya menjauhkan diri dari pemerintahan Orde Baru, tetapi melakukannya secara bertahap dan tidak menyolok, sambil menunggu sampai situasi baru muncul, Memperhatikan situasi yang serba tidak menentu itu, sebaiknya perusahaan-perusahaan Australia untuk sementara tidak melakukan investasi di Indonesia. Sehubungan dengan itu seorang Miles Kupa yang pada saat itu juga dicalonkan sebagai dubes australia yang sedang berada di Bangkok, mengeluarkan pernyataan bahwa dia mengundurkan diri dari pencalonan tersebut, karena ternyata dapat mengganggu hubungan bilateral Australia-RI. Ia mohon maaf karena rupanya menlu Alexander Downer tidak diberitahu mengenai kasusnya tahun 1988 dan tahun 1992, tapi secara profesional ia tidak merasa telah melakukan kesalahan. (www.indonesia.go.id/id/index. php?option=com)

Dalam masalah terorisme, tak ada yang bisa menyangkal fakta bahwa rakyat Indonesia dan Australia sama-sama merupakan korban kekerasan para militan seperti terlihat dalam insiden 2002, 2004, dan 2005. Karenanya, terorisme merupakan musuh bersama kedua bangsa.

Setiap tahun, ratusan atau mungkin ribuan orang Indonesia datang atau dikirim ke Australia untuk belajar baik *undergraduate* maupun *postgraduate*. Di antara yang ribuan itu ada yang datang dengan beasiswa, ada yang datang atas biaya sendiri. Sebaliknya, puluhan atau ratusan orang Australia juga datang ke Indonesia untuk pertukaran pelajar atau melakukan penelitian. Ini belum terhitung

yang saling berkunjung sebagai wisatawan. Adanya lalu-lintas orang semacam itu sebenarnya bisa memberi kontribusi bagi perbaikan hubungan kedua negara, dengan meningkatkan saling pengertian antara kedua-belah pihak. Indonesia tetap dipandang sebagai mitra politik dan pertahanan yang baik bagi Australia.

Ramalan bahwa Indonesia akan menjadi "raksasa" ekonomi di abad mendatang juga menyebabkan Australia amat membutuhkan Indonesia. Hubungan antar negara sudah bukan hal yang dapat dihindari lagi, tidak ada negara yang dapat hidup sendiri. Sebagai negara yang bersebelahan dengan Indonesia, hubungan dengan Australia harus dapat dipertahankan. Peran pemerintah untuk mendukung iklim hubungan perdagangan dengan Australia sangat penting. Hubungan yang kurang baik akan mendatangkan kerugian di kedua belah pihak. amatlah penting bagi para diplomat dalam menganalisa situasi sosial politik serta perkembangan ekonomi negara lain untuk menyampingkan emosi ataupun "*like-dislike*"-nya, dan memperhatikan kepentingan geopolitik negara yang diwakilinya. jangan kita menganggap hubungan Indonesia-Australia itu berlangsung dengan sendirinya. Hubungan itu perlu diurus secara cermat.

Kedua belah pihak wajib memperhatikan hal-hal yang dianggap peka, dan memperhitungkan apa saja yang dinilai oleh pihak sana sebagai kepentingan nasionalnya. Dan kalau ada konflik potensial antara kepentingan nasional kedua belah pihak, supaya segera dipikirkan, bagaimana menerapkan sedini mungkin mekanisme diplomasi untuk menjembatani perbedaan kepentingan itu. kenapa Australia itu penting bagi Indonesia, dan Indonesia itu penting bagi Australia. Di beberapa kesempatan, Singkatnya, Australia sebagai pangkalan *sains* dan

teknologi, kemahiran manajemen modern dan database (yang mempunyai jaringan komunikasi dengan negara-negara barat lainnya) amat bermanfaat bagi Indonesia yang ingin menyelesaikan Pembangunan Jangka Panjang Nasionalnya dengan sukses.

Australia dapat juga merupakan partner dialog, sebagai dua negara bertetangga, mengenai soal-soal yang berkait dengan hak asasi dan prinsip demokrasi seperti yang dicantumkan di UUD-RI. Indonesia, dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, yang mampu memelihara integritas teritorialnya, yang mampu memelihara stabilitas politik dalam negeri, mendorong pertumbuhan ekonomi secara konstan, memainkan peranan internasional yang bertanggungjawab serta secara bertahap menyempurnakan mutu etika dari budaya politiknya, adalah vital bagi masa depan Australia di jaman purna perang dingin ini - itu merupakan dalil strategis. Sehingga jelaslah bahwa Prospek hubungan kedua negara di masa datang tampaknya akan tetap cerah. *(*www.austembjak. or.id/ jaktindonesian/PD08_01.html)

Hubungan bilateral Indonesia dengan Australia sudah terjalin sangat lama, namun dalam hubungan ini terjadi pasang surut yang dimana dalam hubungan bilateral sering terjadi, namun itu tidak membuat hubungan bilateral ini terputus, bahkan dalam menjalin kerjasama ini dapat terwujud kejasama-kerjasama dalam berbagai sektor bidang, dari hasil kerjasama dengan Australia ini telah dicapai kesepakatan dan beberapa kerjasama yang cukup menguntungkan kedua belah pihak terutama di sektor peternakan. Kerjasama bilateral Indonesia - Australia di bidang Pertanian khususnya sektor peternakan telah berlangsung dalam waktu

yang lama. Australia telah membantu Indonesia lebih dari 20 tahun untuk memberantas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), dan kini Indonesia termasuk negara yang bebas PMK dan diakui secara internasional. Australia juga telah membantu Indonesia membangun Balai Penelitian Peternakan di Ciawi - Bogor. ()http://ikhsani.weebly.com/politics.html)

Kerjasama di bidang pertanian antara Indonesia dan Australia diwadahi dalam suatu Working Group yaitu *Working Group on Agriculture and Food Cooperation* (WGAFC). Pada pelaksanaan Sidang WGAFC XI di Melbourne, Ketua WGAFC Australia dipimpin Dr. Paul Morris, *Executive Manager of Market Access and Biosecurity-AFFA*, sedangkan Ketua WGAFC XI Indonesia adalah Dr. Delima Hasri Azahari. Struktur organisasi WGAFC terdiri dari 4 *Task Force* yaitu *(1) Task Force on Crops and Plant Products, (2) Task Force on Agribusiness and Support System, (3) Task Force on Livestock and Animal Products, (4) Quarantine Consultation.*

Beberapa kesepakatan dalam pertemuan WGAFC XI tanggal 3 – 5 Maret 2005 di Melbourne tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Investment opportunities in Indonesian Food and Agriculture Sector*

   Bayiss Associates Pty Ltd telah melakukan analisis dan menyampaikan informasi bahwa beberapa sektor yang berpeluang dan perlu dilihat serta dipertimbangkan oleh pengusaha-pengusaha Australia diantaranya dalam: pengolahan keju, pengolahan sapi, pengembangan usaha roti, pengolahan dan pengepakan.

2. *Post Tsunami Reconstruction*

Australia melalui ACIAR (Dr. John Skerritt) menginformasikan bahwa pemerintah Australia telah memberikan bantuan kemanusiaan diantaranya : kesehatan dan sanitasi air; koordinasi dan jasa pendukung; produk-produk makanan berkisar $ 33 juta. Hal ini ditegaskan pula dalam pernyataan Perdana Menteri Howard, bantuan Australia sebesar $ 1 milyar melalui *Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development* (AIPRD). Bantuan yang diberikan berupa hibah sebesar $ 500 juta dan loan jangka panjang sebesar $ 500 juta. Fokus bantuan dalam proyek pengembangan ekonomi dan sosial .

3. *Task Force on Crops and Plant Products:*

a. Proyek yang disepakati diantaranya adalah : *the Efficiency of the Indonesian Vegetable Supply Chain* (pihak Indonesia mengharapkan pendanaan dapat diarahkan kepada ACIAR, sementara pihak Australia masih melihat kemungkinannya dari Victorian Government, ACIAR atau DAFF); *Revitalisation of the potato seed project* (sumber pendanaan dari pemerintah Western Australia); *New project proposal for the cotton, mango, sugar and cashew nut industries* (akan didiskusikan lebih lanjut oleh kedua belah pihak melalui Ketua Task Force masing-masing).

b. *A Fresh project proposal on a horticultural centre of information* (akan diperbaiki dan dikomunikasikan lebih lanjut oleh ketua TF masing-masing).

4. *Task Force on Agribusiness Support System:*

   Sebagai follow-up dari kesepakatan Joint Meeting WGTII dan WGAFC telah dilakukan survey dan penelitian oleh Bayiss Associates Pty Ltd *Investment Opportunities in the Indonesian Food and Agriculture Sector* direncanakan akan dipublikasikan, namun dalam pertemuan Task Force ini telah dibahas dan diputuskan untuk lebih disempurnakan oleh DAFF dan akan dikomunikasikan antara Ketua Task Force masing-masing.

5. *Task Force on Livestock and Animal Products*

   - Disepakati pula untuk mengkomunikasikan lebih lanjut dalam setahun ini dalam melaksanakan: pelatihan bagi pegawai pemerintahan Indonesia dalam bidang *management and business planning*; joint investasi dalam industri penyamakan kulit di Indonesia, peluang investasi dalam industri susu di Indonesia, realisasi dari peluang ekspor pakan ternak ke Australia dan kerjasama dengan Universitas Murdoch.
   - Isu pihak Indonesia tentang memberikan batasan berat sapi hidup yang akan diekspor ke Indonesia guna melindungi para peternak lokal, pihak Australia perlu klarifikasi lebih lanjut.

6. *Quarantine Consultation*

   1. Australia akan menyediakan overview untuk kegiatan-kegiatan dari capacity building, termasuk SPS Capacity Building Program dan PRA workshops yang ditanggung DAFF. Pihak Indonesia sangat mendukung pelaksanaan whokshop dimaksud dan akan lebih bagus lagi PRA seminar akan dilaksanakan di Jakarta.

2. Isu-isu yang diangkat dalam pertemuan Tripartite (Indonesia – Australia – PNG) dan Bilateral (Indonesia – Australia) bidang Perkarantinaan dan Kesehatan Hewan dan Tumbuhan, Pebruari 2005 di Canberra – Australia
3. Pembatasan usia ekspor sapi hidup ke Indonesia, pihak Indonesia mengusulkan sebaiknya mengadakan komunikasi yang intensif dengan institusi terkait dalam hal ini Ditjen Peternakan.
4. Penyelundupan Daging, disepakati kedua belah pihak bahwa untuk menanggulangi penyelundupan daging ke Indonesia ini perlu lebih meningkatkan kerjasama melalui tukar menukar informasi dalam pengiriman daging termasuk pengapalannya.
5. Kegiatan survey-survey pest and disease, selama ini dilakukan oleh *Northern Australia Quarantine Strategy (NAQS)* dari pihak Australia termasuk dalam penanganan Avian Influenza (Flu Burung), pihak Indonesia mengusulkan agar kegiatan tersebut juga mencakup penyakit mulut dan kuku di batas-batas wilayah.
6. Operasi Perbatasan, disepakati antara pihak Indonesia, Australia, Papua New Guinea dan Timor Leste untuk mendirikan Joint Study Team untuk meneliti infrastruktur dan fasilitas karantina yang diperlukan di perbatasan Timor Leste dan Papua New Guinea.
7. ISPM 15 (Pengemasan kayu), Indonesia telah memulai mengimplementasikan ISPM 15 (pengemasan kayu) dan berusaha menambah jumlah perusahaan yang memenuhi syarat/berakreditasi dalam

hal ini, sedangkan Australia memberikan pandangannya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pengemasan kayu.

8. Bencana Tsunami telah menghancurkan sejumlah fasilitas karantina dan laboratorium, pihak Indonesia mengusulkan adanya bantuan pihak Australia pada area bencana merupakan bagian dari usaha untuk pembangunan kembali NAD dan Sumut.
9. Pertemuan ASEAN untuk *Fruit Flies*, Indonesia mengharapkan konfirmasi perkembangan lebih lanjut terkait dengan fruit flies project. Pihak Australia bersedia akan memberikan informasi proyek dimaksud.

3.1.1 Kerjasama *Sister Province* Pemerintah Jabar dengan Australia Selatan

Propinsi Jawa Barat dan Negara Bagian Australia Selatan telah menjalin suatu hubungan kerja sama dalam bentuk *Sister Province and State Relationship*. Kerjasama antara Pemerintah Jawa Barat dengan Australia Selatan di bidang Prasana air dalam bentuk *Memorandum Of Understanding* (MOU). Kerjasama Bilateral antara dua negara juga mempunyai prinsip yang saling menguntungkan, saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain dalam langkah pengambilan kebijakan di negaranya masing-masing.

Memorandum saling pengertian antara propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Indonesia) dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan (Australia)tentang Hubungan Kerjasama Propinsi Bersaudara Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak akan mewujudkan hubungan kerjasama propinsi bersaudara untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang saling menguntungkan dan efektif dalam pembangunan kedua daerah dalam batas kemampuan keuangan dan teknis masing-masing, di dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Promosi pariwisata, perdagangan dan penanaman modal (investasi)
2. Pengembangan sumber daya manusia
1. Ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Pemuda, olahraga dan kebudayaan
3. Mendorong pengembangan usaha swasta diberbagai sektor ekonomi
4. Pengembangan prasarana khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber-sumber air
5. Bidang-bidang lain yang disetujui oleh para pihak.

Adapun perjanjian kerjasama yang dilakukan Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Australia Selatan mengenai Hubungan Kerjasama Bersaudara yang dimana kerjasama ini telah disetujui dalam MoU.

Kesepakatan usaha antara Badan Promosi dan Pengolaan Keterkaitan Usaha Jawa Barat dan Perusahaan Negara Australia Selatan untuk Kerjasama Dalam Memperkembangkan Prasarana Air Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak akan mengadakan kerjasama dalam bidang penyediaan dan pengelolaan penyediaan air, perawatan air limbah dan teknologi yang berkenaan dengan air di jawa barat

Kerjasama ini akan termasuk:

1. Mengenali proyek-proyek prasarana air dan air limbah yang sesuai untuk pengikutsertaan dan investasi sektor swasta
2. Menyediakan teknologi air yang sesuai secara komersial.

Prioritas mula-mula difokuskan kepada:

1. Pengembangan lembah Bandung, termasuk pengembangan sumber-sumber alternatip dari air yang tergenang di atas untuk mengantikan pemakaian air tanah, dan perendahan polusi Sungai Citarum yang disebabkan oleh pembuangan air limbah dari industri dan domestik (misalnya, melalui penyediaan plant perawatan air limbah yang terpusat untuk daerah industri yang baru.
   (*Memorandum Of Understanding* (MoU) Pemerintah Jabar dengan Pemerintah Australia Selatan).

Kerjasama ini terjalin karena memiliki permasalahan yang sama yang sama-sama mempunyai masalah mengenai prasarana air di masing-masing pemerintahan. Kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan masing-masing negara tersebut berlaku untuk beberapa bidang pembangunan dan telah disepakati sejak 21 Agustus 1997, dimana salah satu bidangnya yaitu PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER AIR.

Dalam kaitannya dengan hal ini, Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan telah bersepakat untuk kerja sama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam pembuatan Pola Induk, dimana the *South Australian Water Corporation* telah ditunjuk mewakili pemerintahnya.

Pemerintah Propinsi Jawa Barat telah membentuk Badan Kerja Sama Pengembangan dan Pengusahaan Prasarana Air Jawa Barat dengan tugas antara lain:

1. Mempersiapkan Pola Induk
2. Mempersiapkan pembentukan Badan Usaha di bidang Air Baku. Badan Kerja Sama merupakan pula EMBRIO dari Badan Usaha tersebut.
3. Bekerja sama dengan SA Water

One Resource-One Plan-One Integrated Management merupakan prinsip dasar yang telah dipilih untuk pembuatan Pola Induk. Adapun strategi yang dijabarkan yaitu dikembangkannya suatu sistim pengelolaan sumber air dan sistem pengelolaan pemanfaatan air yang dapat menunjang pembangunan ekonomi sedemikian:

1. Hingga air yang disediakan dapat mencukupi kebutuhan air untuk domestik, pertanian dan industri.
2. Dengan kondisi lingkungan tetap terkendali
3. Adanya kelembagaan yang dapat menjamin peran lebih besar kepada:
   a. Masyarakat pemakai air
   b. Mitra swasta
   c. Upaya pemanfaatan yang lebih efisien dari aset yang telah dibangun. Dalam Pola Induk.

   Maka dengan dilaksanakanya program kerjasama *sister province* akan dilaksanakan program-program kerjasamanya yang dimana ada 7 program-program yang dilaksanakan antara lain :

   1. Program pengelolaan prasarana pengamanan dan pendayagunaan Sungai.
   2. Program Pengelolaan Prasarana Pengendali banjir
   3. Program penghijauan dan terasiring
   4. Program Pengolahan Kuantitas Air
   5. Program Penelitian dan Pengembangan
   6. Program Pengelolaan Kualitas Air
   7. Program Pengelolaan Prasarana Pengairan

3.1.1.1 *Memorandum of Understanding* (MoU)

Tahapan Penyusunan *Memorandum Of Understanding* (MoU). Sebagai tindak lanjut ditandatangani *Letter Of Intent* (LOI) kedua pihak dapat menyiapkan

rancangan dokumen kerjasama yang biasanya dibuat dalam bentuk *Memorandum Of Understanding* (MoU). Dalam rancangan MoU sudah dirinci mengenai tujuan, program dan bidang kerjasama. Dalam tahapan penyusunan MoU ini pemerintah daerah/kota menempuh pendekatan. Kepihak luar negeri yaitu pembahasan yaitu pembahasan rancangan MoU dengan partnernya di luar negeri. Kepihak dalam negeri yaitu melaporkan/meminta persetuan Pemerintah Pusat atas hasil pembahasan rancangan MoU. Tahap penyelesaian *Memorandum of Understanding* (MoU) maka Depdagri akan memintakan persetujuan kepada Sekretariat Negara dan permintaan surat Kuasa (*full power*) dari Departemen Luar Negeri. Penandatanganan MoU merupakan suatu cara resmi yang dilakukan di Indonesia atau negara partner kerjasama.

Yang dimana isinya adalah Memorandum saling pengertian antara Propinsi Jawa Barat (Indonesia) dengan Pemerintah Negara Bagian Australia Selatan (Australia) tentang Hubungan Kerjasama Propinsi Bersaudara

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pemerintah Propinsi Jawa Barat, Republik Indonesia dan Peremerintah Negara Bagian Australia Selatan, selanjutnya disebut “Para pihak”. Berhasrat untuk memajukan hubungan kerjasama yang harmonis dan menguntungkan antara dua daerah. Mengakui pentingnya asas persamaan dan saling menguntungkan. Merujuk naskah pernyataan keinginan bersama antara Pemerintah Daerah Jawa Barat , Republik Indonesia dan Pemerintahan Negara Bagian Australia Selatan, Australia

Para pihak akan mewujudkan hubungan kerjasama propinsi bersaudara untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang saling menguntungkan dan efektif dalam pembangunan kedua daerah dalam batas kemampuan keuangan dan teknis masing-masing dalam bidang-bidang sebagai berikut:

1. Promosi pariwisata, perdagangan dan penanaman modal (investasi),
2. Pengembangan sumber daya manusia,
3. Ilmu pengetahuan dan teknologi,
4. Pemuda, olahraga dan kebudayaan,
5. Mendorong pengembangan usaha swasta diberbagai sector ekonomi,
6. Pengembangan prasarana khususnya yang menyangkut pengelolaan sumber-sumber air,
7. Bidang-bidang lain yang disetujui oleh para pihak.

Adapun perjanjian kerjasama yang dilakukan Propinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Australia Selatan mengenai Hubungan Kerjasama Bersaudara yang dimana kerjasama ini telah disetujui dalam MoU. Yaitu Kesepakatan usaha antara Badan Promosi dan Pengolaan Keterkaitan Usaha Jawa Barat dan Perusahaan Air Negara Australia Selatan untuk Kerjasama Dalam Memperkembangkan Prasarana Air. Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Para pihak akan mengadakan kerjasama dalam bidang penyediaan dan pengelolaan penyediaan air, perawatan air limbah dan teknologi yang berkenaan dengan air di jawa barat

Kerjasama ini akan termasuk:

1. Mengenali proyek-proyek prasarana air dan air limbah yang sesuai untuk

pengikutsertaan dan investasi sektor swasta.

2. Menyediakan teknologi air yang sesuai secara komersial.
3. Memberikan fasilitas kepada sektor swasta untuk ikut serta dan mengadakan investasi.
4. menyediakan teknologi air yang sesuai secara komersial.

Prioritas mula-mula difokuskan kepada:

1. Pengembangan sumber air secara maksimum (termasuk penyimpanan, perawatan dan distribusi) dari lembah sungai-sungai.
2. Pengembangan lembah Bandung, termasuk pengembangan sumber-sumber alternatip dari air yang tergenang di atas untuk mengantikan pemakaian air tanah, dan perendahan polusi Sungai Citarum yang disebabkan oleh pembuangan air limbah dari industri dan domestik (misalnya, melalui penyediaan plant perawatan air limbah yang terpusat untuk daerah industri yang baru).

Semua proyek yang ada diadakan dibawah kesepakatan usaha akan pertama-tama dibicarakan oleh BPPKU dan *SA Water* (*Memorandum of Understanding sister province* pemerintah Propinsi Jawa barat dengan Australia Selatan).

3.1.2 Kebijakan Prasarana Air

Dalam pelaksanaan kerjasama *sister province* pemerintah Jawa Barat dengan pemerintah Australian Selatan mengenai kerjasama mengenai prasarana air berpedoman kepada kebijakan prasarana air yaitu, Pelita VI.

Pelita VI, merupakan pijakan landasan baru bagi Pemerintah untuk memulai periode pembangunan jangka panjang tahap II (PJP-II). Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai pada PJP -I dan secara nyata dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat dapat digambarkan dari turunnya angka kemiskinan yang sebelumnya 70 juta jiwa (60% pada tahun 1970) menjadi 27 juta (15% pada tahun 1990), demikian juga dari indikator ekonomi tingkat pendapatan per kapita naik dari US$ 70 pada awal PJP-I menjadi US$ 650 pada akhir PJP-II, dan dari indikator kesejahteraan dapat digambarkan pada tahun 1970 usia harapan hidup adalah 45,7 tahun menjadi 62,7 tahun pada tahun 1993, dan tingkat kematian bayi menurun dari 145 per 1000 kelahiran hidup menjadi 58 per 1000 kelahiran hidup. Dalam Pelita VI Pemerintah menitikberatkan pembangunan sarana dan prasarana air bersih melalui program penyediaan dan pengelolaan air bersih di perkotaan maupun perdesaan. Kegiatan bagi daerah perkotaan adalah:

1. Upaya penurunan kebocoran air PDAM menjadi 25% untuk daerah metropolitan dan kota besar, sedangkan untuk kota sedang dan kota kecil diturunkan sampai menjadi 30%,
2. Peningkatan dan perluasan prasarana air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk serta menunjang perkembangan ekonomi kota dan kawasan pertumbuhan melalui sistem perpipaan dan non perpipaan.

Peningkatan pemanfaatan kapasitas produksi terpasang melalui perluasan jaringan distribusi, sambungan rumah, hidrant umum,terminal air, peningkatan kapasitas produksi terpasang dan perluasan jaringan distribusi baru sebesar 30.000

liter/detik sehingga dapat menambah pelayanan sebanyak 22 juta jiwa, peningkatan efisiensi pengelolaan dan pengusahaan PDAM.

3.2 Bandung

Kota Bandung yang terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Jawa Barat. Lokasi Kota Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Hal tersebut disebabkan oleh :

1. Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya :
   a. Barat - Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota Negara
   b. Utara - Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan).
2. Letak yang tidak terisolasi dan dengan komunikasi yang baik akan memudahkan aparat keamanan untuk bergerak ke setiap penjuru

Iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk.Temperatur rata-rata 23,10 C, curah hujan rata-rata 204,11 mm, dan jumlah hari hujan rata-rata 18 hari per bulannya.

Secara topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter di atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dan terendah di sebelah Selatan 675 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Kota Bandung bagian selatan sampai lajur lintasan kereta api, permukaan tanah relatif datar sedangkan di wilayah kota bagian Utara berbukit-bukit yang menjadikan panorama indah.

Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada jaman kwarter dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, di bagianselatan serta di bagian timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan liat. Di bagian tengah dan barat tersebar jenis tanah andosol. Adapun sungai-sungai yang berada di kota Bandung, yaitu :

Tabel 3.1
Sungai-sungai di Kota Bandung

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Debit Max (m^3/detik)	Debit Min (m^3/detik)
1	Sungai Cikapundung	28	250	12
2	Sungai Cikapundung Kolot	10	75	4,5
3	Sungai Cipamokolan	18	40	1,25
4	Sungai Cidurian	20	83	1,25
5	Sungai Ciparumpung	10	20	0,2
6	Sungai Cicadas	18	17	0,6
7	Sungai Cihampelas	8,5	15	0,7
8	Sungai Cinambo	7,3	15	0,5
9	Sungai Citepus	6,5	50	0,1
10	Sungai Cibeureum	12	38	0,75

(Sumber: Litbang, diolah dari Dinas Pengairan Kota Bandung)

3.2.1 Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bandung tahun 2002 adalah sebanyak 1.868.542 jiwa. Pertumbuhan penduduk rata-rata dari tahun 1997 adalah 1,65%. Pertumbuhan penduduk tertinggi adalah pada tahun 2000 dan pertumbuhan penduduk minus terjadi pada tahun 2001.

Tabel 3.2
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

No.	Kecamatan	Luas. (Km^2)	Jumlah	Kepadatan
1.	Bandung Kulon	6,48	94.585	14.596
2.	Babakan Ciparay	7,96	84.253	10.585
3.	Bojongloa Kaler	3,03	84.834	27.998
4.	Bojongloa Kidul	6,27	59.142	9.433
5.	Astanaanyar	2,89	69.936	24.199
6.	Regol	4,30	69.697	16.209
7	Lengkong	5,92	69.751	11.782
8	Bandung Kidul	4,32	34.229	7.923
9	Margacinta	10,90	73.712	6.763
10	Rancasari	13,18	51.613	3.916
11	Cibiru	10,61	58.985	5.559
12	Ujungberung	10,35	59.598	5.758
13	Arcamanik	8,80	69.816	7.934
14	Cicadas	8,67	85.704	9.885
15	Kiaracondong	3,40	103.865	30.549
16	Batununggal	5,27	103.016	19.548
17	Sumur Bandung	6,13	39.285	6.409
18	Andir	3,71	88.767	23.926
19	Cicendo	6,87	. 85.274	12.413
20	Bandung Wetan	3,39	55.098	16.253
21	Cibeunying Kidul	4,62	91.066	19.711
22	Cibeunying Kaler	4,32	54.392	12.591
23	Coblong	7,00	97.096	13.871
24	Sukajadi	5,92	79.933	13.502
25	Sukasari	. 6,28	60.396	9.617
26	Cidadap	6,11	. 42.967	7.032
	Jumlah	166,70	1.867.010	11.200

Sumber: BPS Kota Bandung (Hasil Registasi Penduduk)

Dengan banyaknya populasi yang ada di kota Bandung maka persedian air bersih harus ditingkatkan, karena setiap tahun populasi di kota Bandung makin meningkat.

3.2.2 Parasarana Air Kota Bandung

Bandung adalah ibukota Jawa Barat yang dimana merupakan salah satu propinsi di Indonesia terletak di Pulau Jawa dan berada di bagian barat pulau tersebut. Pada tahun 1998 dilaporkan bahwa Propinsi tersebut dihuni penduduk sebanyak 42 juta jiwa. Propinsi ini berbatasan langsung dengan DKI di sebelah utara dan dengan propinsi Jawa Tengah di sebelah timur.

Sumber air bersih untuk pelayanan Kota Bandung berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam. Kapasitas produksi air bersih dari ketiga jenis sumber adalah sebesar 77.902.392 m^3. Jika dibandingkan dengan tahun 1998 yang hanya 71.067.511m^3, kapasitas sumber air tersebut mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,34% setiap tahunnya. Berikut ini adalah tabel produksi dari masing-masing sumber selama tahun 2002.

Tabel 3.3
Produksi Air Bersih Di Kota Bandung Pada Tahun 1997 – 2002

No	Sumber Air Bersih	Kapasitas (m^3) 1997	Kapasitas (m^3) 1998	Kapasitas (m^3) 1999	Kapasitas (m^3) 2000	Kapasitas (m^3) 2001	Kapasitas (m^3) 2002
1	Sungai	61.768.346	62.456.725	63.523.326	65.498.308	67.256.423	67.443.289
2	Danau	-	-	-	-	-	-
3	Waduk	-	-	-	-	-	-
4	Mata air	3.732.564	3.854.658	4.012.174	3.091.168	3.204.669	5.067.147
5	Artesis/ Air tanah/ Sumur bor	3.957.299	3.756.128	4.310.835	4.765.436	5.028.475	5.319.906
	Jumlah	69.458.209	71.067.511	71.846.335	73.354.912	75.489.567	77.902.342

Sumber: PDAM Kota Bandung dalam Kota Bandung

Prasarana air di kota Bandung banyak mengalami masalah diantaranya

1. Adanya penurunan permukaan air tanah yang besar.

2. Adanya polusi air yang disebabkan limbah pertanian, limbah pemukiman, dan limbah industri.
3. Erosi lahan dan sedimentasi.
4. Penurunan fungsi konservasi sumber air.
5. Banjir.
6. Degradasi alur sungai dan muara sungai.
7. Penurunan tingkat kesehatan lingkungan, dikarenakan air penggelontoran pemukiman tidak terjamin.
8. Debit aliran pemeliharaan sungai tidak selalu tersedia.

(*Puslitbang Kota Bandung*)

Air bersih dewasa ini sudah menjadi permasalahan besar yang melanda kota-kota besar di Indonesia. Konflik air antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya, makin kerap terjadi. Konflik antara warga suatu daerah dengan pabrik bukan hal aneh lagi. Penduduk sekitar menuduh keringnya sumur-sumur mereka karena pihak pabrik berlaku curang, menyedot air sumur dangkal yang bukan haknya. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang seharusnya mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, pada kenyataannya belum mampu berbuat banyak.

Karenanya, keluhan terhadap PDAM lebih lancar ketimbang aliran air yang datang ke rumah-rumah penduduk, belum lama ini tak jarang konflik air menyebabkan kericuhan antar tetangga, sebagian penduduk Kota Bandung terpaksa harus membeli air dengan harga sekitar Rp 500,00 per jerigen, dulu penduduk Bandung selalu mendapatkan air yang melimpah, karena posisi kota ini

sangat strategis, dikelilingi gunung-gunung tempat beradanya sumber-sumber air.

Tak heran mata-mata air menjadi sumber air bersih warga kota. Tetapi sekarang, mata air pun tak lagi mampu menyembur keluar dari tanah. Melimpahnya air justru terjadi di musim penghujan. Namun itu bukan air bersih tetapi air hujan yang dilimpaskan melalui got-got saluran air atau air bah kiriman yang warnanya coklat tanah, bahkan hitam pekat bercampur limbah rumah tangga dan limbah pabrik sebenarnya sudah mulai sejak 1970.

Sumber air tanah telah dieksploitasi melebihi kapasitas alamiahnya, sehingga berakibat terjadinya kerucut-kerucut muka air tanah di kawasan pemusatan industri. Antara lain Leuwigajah, Dayeuhkolot, Banjaran, Cicadas. Sebelum tahun 1970, rata-rata produksi sumur bor di Cekungan Bandung masih berada pada batas wajar yaitu 0,1 juta m3/tahun.

Dengan rata-rata produksi sebesar itu, tidak memberikan dampak terhadap hidrolika air tanah dan lingkungan. Eksploitasi air tanah meningkat dengan tajam pada periode 1971 - 1991. Hal tersebut berakibat pada penurunan yang cukup tajam pada produksi rata-rata air sumur bor menjadi 0,03 juta m3/tahun. Bahkan dalam periode yang lebih pendek lagi yaitu dari 1992 - 1995 rata-rata produksi sumur bor menjadi makin kecil lagi. Tahun 2000 diperkirakan menuju pada angka 0,01 juta m3/tahun. (Penelitian PU Cipta Karya)

Hal itu sejalan dengan semakin banyaknya titik-titik sumur bor di Cekungan Bandung. Tahun 1970, hanya ada 95 titik dengan pengambilan air sekitar 10,5 juta m3/tahun. Tahun 1990 meningkat pesat menjadi 971 titik dengan jumlah debit pengambilan tercatat sekitar 48,8 juta m3/tahun. Jumlah titik sumur

bor "meledak" antara tahun 1992 - 1995 menjadi 2.225 titik, dengan jumlah pengambilan air 67 juta m3/tahun. Jumlah itu, bisa jadi lebih besar karena mungkin masih banyak titik-titik sumur bor yang tidak tercatat.

Kekritisan kondisi air di Cekungan Bandung juga terlihat dari sumur pantau di sejumlah tempat. Sumur pantau di Batujajar pada 1910 masih menunjukkan tinggi permukaan air positif (+) 25 meter. Tetapi kini di daerah Batujajar, Ngamprah, dan Cimahi Tengah turun antara 8-58 meter. Sumur pantau di daerah Cimahi Selatan-Marga Asih tahun 1902 masih menunjukkan (+) 19,5 meter. Sekarang tinggi muka air di daerah itu negatif (-) 18-86 meter. Sumur pantau di Bandung Kulon-Andir pada 1953 menunjukkan (+) 13,4 meter. Sekarang (-) 38-57 meter. Demikian pula sumur pantau di Margahayu-Katapang-Soreang pada 1953 masih menunjukkan angka (+) 4,84 meter. Tetapi sekarang (-) 1-29 meter.

Sumur pantau di Dayeuhkolot pada 1919 menunjukkan (+) 3 meter, kini kondisi sangat parah yakni (-) 20-80 meter. Berdasarkan hasil penelitian IWACO tahun 1991, penurunan di daerah tersebut menunjukkan (-) 50 meter.

Demikian pula sumur pantau di Batununggal-Kiaracondong, tahun 1919 masih menunjukkan (+) 17,5 meter, tetapi sejak tahun 1970-an, terus menurun hingga saat ini tercatat (-) 39-47 meter. Turunnya tinggi pisometric air tanah berdampak pada perubahan hidrolika air tanah. Akibatnya, mata air di Bandung Utara misalnya di Ledeng, kini tak bisa lagi menyemburkan air. Padahal sebelum tahun 1970, banyak terdapat mata air di daerah Cihideung, Perkebunan Teh di Bandung Utara, kaki Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Parahu.

Penurunan muka air tanah juga menimbulkan dampak lain yang beruntun, berupa penurunan permukaan tanah dan terjadinya kontaminasi antara air permukaan dan air dangkal terhadap air tanah dalam. Kontaminasi itu terjadi karena adanya *interflow* antar-akifer. Hal tersebut, berhubungan dengan pengendalian limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri. Kini dalam sumur-sumur dangkal penduduk ditemukan bakteri *coli* dan disinyalir ada bakteri *nitrit.* (http://www.pikiran-rakyat.com/02051002.htm)

3.2.3 Upaya Pemerintah Bandung dalam Mengatasi Prasarana Air Bersih

Upaya melindungi sumber air, saat ini mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah. Hal ini berangkat dari kesadaran masyarakat dan pemerintah bahwa sumber air sebagai unsur lingkungan yang vital merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat menjamin berlanjutnya kehidupan. Berbagai peraturan perundang-undangan dikeluarkan seperti Ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Undang-undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No.7/2000 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan-peraturan pelaksanaannya antara lain dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 22/1982 tentang Tata Pengaturan Air, PP 27/1991 tentang Rawa, PP 35/1991 tentang Sungai, PP 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, PP 16/2001 tentang Penatagunaan Tanah dan Keppres No.32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Untuk mendukung upaya-upaya hukum tersebut, Pemda, Prov. Jabar

menindaklanjuti dengan mengeluarkan beberapa perda, antara lain Perda No. 3/2001 tentang Pola Induk Pengelolaan Sumber daya Air di Provinsi Jawa Barat, Perda No. 20/1995 tentang Garis Sempadan Sungai dan Sumber Air dan Perda No. 12/1997 tentang Pembangunan di Pinggir Sungai dan Sumber Air, merupakan upaya komprehensif dalam melakukan perlindungan, pengembangan pemanfaatan, dan pengendalian sumber daya air.

Oleh karena itu, perda ini dimaksudkan untuk penataan bangunan di pinggir sumber air, perlindungan masyarakat dari daya rusak air, penataan lingkungan, dan pengembangan potensi ekonomi agar dapat dilaksanakan sesuai tujuannya. Dengan kata lain, penetapan daerah sempadan sumber air bertujuan agar :

1. Fungsi sumber air tidak terganggung oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya;
2. Daya rusak air pada sumber air dan lingkungannya dapat dibatasi dan dikendalikan;
3. Kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber air dapat memberikan hasil secara optimal, sekaligus menjaga kelestarian fisik dan kelangsungan fungsi sumber air;
4. Pembangunan dan/atau bangunan di pinggir sumber air wajib memerhatikan kaidah-kaidah ketertiban, keamanan, keserasian, kebersihandan keindahan daerah sempadan sumber air;
5. Para penghuni dan/atau pemanfaat bangunan serta lahan di pinggir sumber air, wajib berperan aktif dalam memelihara kelestarian sumber air.

Ruang lingkup pengaturan daerah sempadan sumber air lintas kabupaten/kota yang dikelola oleh pemerintah daerah, meliputi penetapan garis sempadan, pengaturan bangunan di pinggir garis sempadan, pembinaan dan pengawasan, penataan dan pemanfaatan daerah sempadan. Dalam hal pengelolaan daerah sempadan sumber air tersebut, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya. Sedangkan dalam hal penataan dan pemanfaatannya dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga. (Penelitian PU Cipta Karya)

3.2.3.1 Upaya Penyelamatan Air Bersih di Kota Bandung

Untuk mengatasi masalah air bersih di kota bandung, para pengambil kebijakan di wilayah Bandung harus membuat tata aturan dan perangkat hukumnya (*rule of law*), kemudian menegakkan aturan main yang sudah ada yang berkait, baik langsung maupun tidak langsung dengan persoalan sumber daya air. Perda yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Bandung menyebutkan maksimal 60 persen dari lahan yang ada boleh didirikan bangunan, sedangkan sisanya 40 persen harus dibiarkan menjadi ruang terbuka supaya masih ada lahan untuk penghijauan dan tempat air meresap ke dalam tanah. Aturan ini harus diterapkan konsisten. Begitu pula masing-masing pemkot yang ada di wilayah Bandung juga harus melakukan tindakan hukum yang tegas kepada yang melanggar perda mengenai peruntukan ruang terbuka hijau (RTH), yang terdapat di wilayahnya masing-masing.

Hal yang sama juga dikenakan kepada pelanggar Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 63/1993, yang mengatur sempadan sungai di perkotaan selebar 15- 20 meter, serta kepada pelaku industri yang melanggar perda yang mengatur proses pembuangan limbah industri. Masyarakat yang seenaknya membuang limbah ke sungai pun harus ditindak tegas.

Sekarang ini pemanfaatan maupun pengamanan sumber daya air di berbagai daerah kerap kali masih dilihat secara administratif. Belum tercipta sebuah kebijakan yang koordinatif, dan lintas sektoral. Bahkan dengan berlakunya otonomi daerah, daerah seolah berlomba-lomba mengelola sumber daya air semata-mata sebagai potensi mengeruk pendapatan asli daerah (PAD).

Kerjasama antarinstansi atau antarsektor dalam menangani persoalan sumber daya air masih dilakukan sendiri-sendiri. Misalnya, air sungai ditangani Departemen Kimpraswil atau Pekerjaan Umum, air tanah ditangani Biro Tata Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), air minum oleh PDAM, sedangkan daerah aliran sungai dikelola Departemen Kehutanan. (Penelitian PU Cipta Karya)

3.2.3.2 Upaya-upaya Gerakan Hemat Air (GHA)

Upaya-upaya gerakan hemat air (GHA) yang selama ini lebih banyak diperlakukan sekedar slogan. GHA telah dicanangkan sejak Oktober 1994, namun hingga kini hanya sekedar wacana. Untuk merealisasikannya dibutuhkan keteladanan, termasuk dari jajaran pejabat maupun para *stakeholder* Kota Bandung. Selain itu, yang juga perlu dilakukan dalam merealisasikan GHA adalah melibatkan secara pro-aktif dunia pendidikan, dari tingkat terendah hingga tertinggi, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini sangat penting.

Berdasarkan pencatatan penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Bandung yang saat ini berusia 5-24 tahun tercatat 746.073 jiwa, atau sekitar 39,1 persen dari total penduduk ibu kota Provinsi Jawa Barat ini. Hampir setengah dari penduduk Kota Bandung saat ini berstatus pelajar atau mahasiswa. Jika pembudayaan GHA diterapkan secara sungguh-sungguh di semua lapisan jenjang pendidikan, budaya perilaku GHA diharapkan juga akan menjadi tradisi. (Penelitian PU Cipta Karya)

3.2.3.3 Upaya Menangani Banjir

Menyikapi makin meluas dan intensifnya bencana banjir di Indonesia sebagai dampak dari berbagai kekurangan/kelemahan dalam manajemen dan pengendalian banjir selama ini, maka untuk memperkecil resiko akibat banjir**.**

1. Upaya Penanganan masalah banjir perlu dilakukan secara menyeluruh yang merupakan kombinasi upaya struktur dan non struktur yang dikaitkan dengan pengelolaan Sumber Daya Air dengan pendekatan wilayah sungai secara menyeluruh dan terpadu dari hulu sampai ke hilir dengan memperhatikan aspek konservasi eko-hidrologis, pemanfaatan dan pengendalian daya rusak air.
2. Penanganan masalah banjir harus mengikutsertakan pastisipasi seluruh *stake holders* dengan pembagian peran yang jelas dan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, sejak perencanaan sampai dengan operasi dan pemeliharaannya.
3. Perlu pengaturan dan peninjauan kembali beberapa hal yang menyangkut aspek ketatalaksanaan, pembagian wewenang dan mekanisme koordinasi

dalam kaitannya dengan UU 22/1999 dan PP 25/2000 serta paradigma baru dalam pengelolaan SDA.

Upaya-upaya yang perlu segera dilaksanakan sebagai akibat dari upaya poin 2 dan 3 diatas :

1. Penyuluhan kepada masyarakat lewat berbagai media menyangkut pengetahuan tentang banjir, berbagai upaya menyeluruh mengatasi masalah banjir, manfaat dan kinerja upaya struktur dalam rangka mengurangi Penyiapan peta rawan genangan (resiko banjir) termasuk pemasangan rambu-rambu peringatan,
2. Peninjauan kembali penataan ruang di lahan dataran banjir dalam rangka mengurangi resiko banjir dan menghidupkan kembali fungsi-fungsi wadah air untuk menampungnya,
3. Peninjauan kembali penataan ruang dan pola pembudidayaan lahan di DAS hulu dalam rangka menunjang upaya konservasi tanah dan air serta pengendalian banjir.
4. Peninjauan kembali perijinan resiko banjir." Revitalisasi sistem prakiraan dan peringatan dini serta prosedur dan tata cara tanggap darurat, berikut sosialisasi dan pelatihan oleh aparat bersama masyarakat.
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya penyelamatan air melalui:
    a. Pembuatan tandon-tandon, kolam-kolam/sumur-sumur resapan,
    b. Tidak meningkatkan pembuangan sampah ke badan-badan air seperti sungai, saluran.

c. Penanaman pohon-pohon untuk semua kawasan hulu dan hilir.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai, kawasan resapan dan situ-situ. (Penelitian PU Cipta Karya)

3.2.3.4 Keuangan Daerah Kota Bandung

Dari sisi penerimaan APBD kota Bandung pada tahun 1997, penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan merupakan yang terbesar yaitu sekitar 61% atau sekitar 559,3 milyar dari sekitar 902,7 milyar, sedangkan penerimaan yang berasal dari. Pendapatan Asli Daerah menyumbang sekitar 20% atau sekitar 188,4 milyar. Sedangkan penerimaan lain yang cukup besar yaitu sebesar 119,9 milyar yang berasal dari penerimaan yang sah lainnya dan sebesar 35 milyar yang berasal dari sisa anggaran tahun lalu.

Dari sisi pengeluaran, anggaran terbesar, diperuntukan bagi belanja rutin yaitu hampir sekitar 75% atau sekitar 679,1 milyar, sedangkan untuk belanja pembangunan, dialokasikan hanya sebesar 226,7 milyar atau sekitar 25%. Dengan alokasi dana pembangunan yang cukup kecil dibandingkan dengan alokasi untuk belanja rutin, salah satu pertimbangan yang dipakai dalam menentukan kebijakan pengelolaan anggaran belanja seperti sebagai berikut; Belanja pembangunan difokuskan pada sektor yang bersifat *cost recovery*.

Tabel 3.3
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 1997

No	PENERIMAAN	JUMLAH (Rp)
1	Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	35.000.000.000
2	Bagian Pendapatan Asli Daerah	188.444.984.400
3	Bagian Dana Perimbangan	559.372.001.000
4	Bagian Pinjaman daerah	0
5	Bagian Lain – lain Penerimaan yang Sah	119.976.042.606

	TOTAL	**902.793.028.006**
	PENGELUARAN	
1	Belanja rutin	679.065.143.006
	Pos DPRD -	
2	Belanja Pembangunan	226.727.885.000
	TOTAL	**902.793.028.006**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung,1998

Penerimaan PAD kota Bandung perlu ditingkatkan seiring dengan berlakunya UU tentang Otonomi Daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendanaan yang selama ini ada, selain berusaha menciptakan sumber-sumber pendanaan baru, baik dari penerimaan sektor pajak maupun perusahaan daerah.

Untuk melaksanakan berbagai sasaran, kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan tahun 1997 Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan dana melalui Anggaran Pembangunan sebesar Rp. 90.096.577.927,62 Jumlah anggaran tersebut diperuntukan bagi 10 Bidang Pembangunan, 19 Sektor, 56 Program yang dimana program sister province termasuk di dalamnya dan realisasinya setelah diperhitungkan adalah sebesar Rp.82.541.652.022,64.

Anggaran pembangunan prasarana air dalam program kerjasama *Sister province* setelah diperhitungkan adalah sebesar Rp 13.650.420.750,12. ini adalah anggaran yang cukup besar yang dikarenakan pembangunan program prasarana air sangat berpengaruh bagi ekonomi, kesehatan masyarakat.